

**PENGARUH IPM, BELANJA MODAL DAN PMTB TERHADAP
KETIMPANGAN DI WILAYAH TIMUR INDONESIA**



Skripsi Oleh :

Fachri Adi Muslianto

01021181823003

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH IPM, BELANJA MODAL DAN PMTB TERHADAP
KETIMPANGAN DI WILAYAH TIMUR DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Nama : Fachri Adi Muslianto
NIM : 01021181823003
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Tanggal Persetujuan

17 / 11 - 2022

.....

27 OKTOBER 2022

.....

Dosen Pembimbing



Dr.H. Azwardi, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH IPM, BELANJA MODAL DAN PMTB TERHADAP KETIMPANGAN DI WILAYAH TIMUR DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Nama : Fachri Adi Muslianto
NIM : 01012118182303
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/ Kosentrasi : Ekonomi Regional

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 2 Januari 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 18 Januari 2023

Ketua

Dr.H.Azwardi S.E. M.Si
NP. 196805181993031003

Anggota

Feny Marissa. S.E.. M.Si
NIP. 199004072018032001

Anggota

Imelda. S.E.. M.S.E
NIP. 1977030922009122002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr.Mukhlis, S.E.,M.Si
NIP 197304062010121001

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 20-1-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Fachri Adi Muslianto

NIM : 01021181823003

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Ekonomi Regional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : Pengaruh IPM, Belanja Modal dan PMTB Terhadap Ketimpangan di Wilayah Timur Indonesia

Pembimbing

Ketua : Dr.H.Azwardi, S.E., M.Si

Anggota : Feny Marissa, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 2 Januari 2023

Adalah benar hasil karya ilmiah saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjaan.

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 20-1-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

Indralaya, 18 Januari 2023



Fachri Adi Muslianto
NIM. 01021181823003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh IPM, Belanja Modal dan PMTB terhadap Ketimpangan di Wilayah Timur Indonesia” skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas sejauh mana variabel indeks pembangunan manusia, Belanja modal dan pembentukan modal tetap bruto mempengaruhi ketimpangan yang terjadi di Wilayah Timur Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai kendala. Berkat bantuan, doa bimbingan dan dukungan dari bebrbagai pihak skripsi ini dapat selesai.

Indralaya, 19 Januari 2023



Fachri Adi Muslianto

01021181823003

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama berjalannya proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dari berbagai belah pihak, atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, seta ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Penulis ingin menyampaikan banyak rasa terimakasih kepada : .

1. Bapak Dr.H. Azwardi, S.E., M.Si dan Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Imelda, S.E., M.S.E selaku dosen penguji skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran terhadap skripsi saya.
3. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan dan juga dosen pembimbing akademik saya.
4. Kedua orang tua saya cintai, yang selalu memberikan motivasi, semangat serta doa yang tidak pernah berhenti ketika sedang melakukan perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, 19 Januari 2023



Fachri Adi Muslianto

01021181823003

ABSTRAK

PENGARUH IPM, BELANJA MODAL DAN PMTB TERHADAP KETIMPANGAN DI WILAYAH TIMUR INDONESIA

OLEH

Fachri Adi Muslianto; Azwardi; Feny Marissa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja modal dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi di Wilayah Timur Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari 12 provinsi di Wilayah Timur Indonesia selama periode 2011-2020. Hasil penelitian dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa secara simultan IPM, Belanja Modal dan PMTB berpengaruh terhadap ketimpangan. Secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Pemerintah perlu melakukan pemerataan dalam penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia. Perlunya pemerataan investasi yang tidak hanya berpusat pada daerah – daerah maju di Kawasan Timur Indonesia.

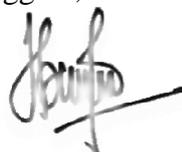
Kata Kunci : IPM, Belanja Modal, PMTB, Ketimpangan Pembangunan

Ketua,



Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

Anggota,



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP 197304062010121001

ABSTRACT

THE EFFECT OF HDI, CAPITAL EXPENDITURE AND PMTB ON INEQUALITY IN EASTERN INDONESIA

BY

Fachri Adi Muslianto; Azwardi; Feny Marissa

This study aims to determine the effect of the Human Development Index (HDI), Capital Expenditure and Gross Fixed Capital Formation on development inequality that occurs in Eastern Indonesia. The data used in this study is panel data consisting of 12 provinces in Eastern Indonesia during the 2011-2020 period. The results of the study by using the Fixed Effect Model method showed that simultaneously HDI, Capital Expenditure and PMTB affect inequality. Partially, Human Development Index (HDI) and Capital Expenditure have a positive and significant effect on development inequality while Gross Fixed Capital Formation (PMTB) has a negative and insignificant effect on development inequality. The government needs to provide an equalize of education and health hopefully it can reduce the level of inequality that occurs in eastern Indonesia. The need for equitable distribution of investment that is not only centered on developed regions in Eastern Indonesia.

Keywords: HDI, Capital Expenditure, PMTB, Development Inequality

Chairman,



Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

Member,



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Knowing

Head of Development Economic Program



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Fachri Adi Muslianto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Juli 2000
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl.Pasir No.24 Jakarta Selatan
Email : Fachriadi9f@gmail.com
No.Handphone : 081398323098



PENDIDIKAN FORMAL

2006-2012 : SDN 03 Cilandak Timur
2012-2015 : SMPN 212 Jakarta
2015-2018 : SMAN 55 Jakarta
2018-2023 : Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya

PENGALAMAN ORGANISASI

Kepala Departemen Media Dan Informasi Himpunan Mahasiswa Banten Jawa Dan Jakarta (HIMA BAJAJ)

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten Jawa Dan Jakarta (HIMA BAJAJ)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Praktis	12
1.4.2. Manfaat Akademis	12
BAB II	13
STUDI KEPUSTAKAAN	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Pertumbuhan Neo Klasik.....	13
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave	14
2.1.3. Teori Investasi Myrdal	15
2.1.4 Konsep Ketimpangan Antar Wilayah	15
2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan.....	16
2.1.6 Konsep Indeks Pembangunan Manusia	17
2.1.7 Konsep Belanja Modal.....	18
2.1.8 Konsep Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.1.9 Konsep Indeks Williamson	20
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	20

2.2.1. Hubungan Antara IPM Terhadap Ketimpangan	20
2.2.2. Hubungan Antara Belanja Modal Terhadap Ketimpangan.....	21
2.2.3. Hubungan Antara PMTB Terhadap Ketimpangan.....	21
2.3 Penelitian Terdahulu.....	22
2.4 Kerangka Pikir.....	27
2.5 Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	29
3.2 Sumber dan Jenis Data	29
3.3 Teknik Analisis.....	30
3.3.1 Indeks Williamson.....	30
3.3.2 Regresi Data Panel	31
3.3.2 Uji Kesesuaian Model.....	33
3.3.2.1 Common Effect Model.....	33
3.3.2.2 Fixed Effect Model	33
3.3.2.3 Random Effect Model	34
3.3.3 Uji Pemilihan Model.....	34
3.3.3.1 Uji Chow (Chow Test).....	34
3.3.3.2 Uji Hausman.....	35
3.3.4 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.3.4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	36
3.3.4.2 Uji Multikolinieritas.....	36
3.3.5 Uji Signifikan Koefisien	37
3.3.5.1 Uji F	37
3.3.5.2 Uji t	38
3.4 Definisi Variabel Operasional	39
3.4.1 Ketimpangan Antar Wilayah	39
3.4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	39
3.4.3 Belanja Modal	39
3.4.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	40
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum	41
4.1.1 Geografis dan Wilayah.....	41

4.1.2	Perkembangan Indeks Williamson Kawasan Timur Indonesia	44
4.1.3	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia.....	47
4.1.4	Perkembangan Belanja Modal di Kawasan Timur Indonesia Periode 2011-2020.....	50
4.1.5	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kawasan Timur Indonesia Periode 2011-2020	52
4.2.	Hasil Penelitian.....	55
4.2.1.	Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	55
4.2.2	Uji Pemilihan Model.....	56
4.2.2.1	Uji Chow	56
4.2.2.2	Uji Hausman.....	57
4.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	61
4.2.3.1	Uji Heteroskedastisitas.....	61
4.2.3.2.	Uji Multikolinieritas.....	62
4.2.4.1	Uji F	63
4.2.4.2.	Uji t.....	64
4.3	Pembahasan	65
4.3.1	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan di Wilayah Timur Indonesia	65
4.3.2	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Ketimpangan yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia	70
4.3.3	Pengaruh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap Ketimpangan di Wilayah Timur Indonesia	73
BAB V	78
KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia 2016-2020 Wilayah Timur Indonesia..	7
Tabel 1. 2 Belanja Modal Tahun 2016-2020 Wilayah Timur Indonesia	9
Tabel 1. 3 PMTB Tahun 2018-2020 Di Kawasan Timur Indonesia	10
Tabel 4. 1 Perkembangan Indeks Williamson Kawasan Timur Indonesia.....	45
Tabel 4. 2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia periode 2011-2022 Wilayah Timur Indonesia.....	48
Tabel 4. 3 Perkembangan Belanja Modal Periode 2011-2020 Kawasan Timur Indonesia	51
Tabel 4. 4 Perkembangan PMTB periode 2011-2020 Kawasan Timur Indonesia	53
Tabel 4. 5 Hasil estimasi common effect, fixed effect dan random effect.....	55
Tabel 4. 6 Hasil Uji Chow.....	56
Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman	57
Tabel 4. 8 Hasil Regresi Metode Fixed Effect Model.....	58
Tabel 4. 9 Hasil Intersep Provinsi di Wilayah Timur Indonesia.....	60
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinieritas	62
Tabel 4. 12 Hasil Uji F.....	63
Tabel 4. 13 Hasil Uji-T	64
Tabel 4. 14 Data Panjang Jalan Kawasan Timur Indonesia Periode 2016-2020 ..	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ketimpangan di Dunia Tahun 2017	5
Gambar 1. 2 Indeks williamson Wilayah Timur Indonesia 2011-2020	6
Gambar 2. 1 Kurva U Terbalik	14
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Wilayah Timur Indonesia	42
Gambar 4. 2 Jumlah Sekolah Kawasan Timur Indonesia 2016-2020	67
Gambar 4. 3 Jumlah Puskesmas Kawasan Timur Indonesia 2020.....	68
Gambar 4. 4 Persebaran Proyek berdasarkan realisasi PMDN	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model	84
Lampiran 2. Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model.....	85
Lampiran 3. Hasil Regresi Data Panel Metode Random Effect Model	86
Lampiran 4. Hasil Uji Chow	88
Lampiran 5. Hasil Uji Hausman	89
Lampiran 6. Uji Heteroskedastisitas	91
Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinieritas.....	92
Lampiran 8. Data PMDN Wilayah Timur 2016-2020	92
Lampiran 9 Data Indeks Williamson Wilayah Timur Indonesia	93
Lampiran 10 Data Panjang Jalan Provinsi	94
Lampiran 11 Data Jumlah Puskesmas Provinsi.....	94
Lampiran 12 Jumlah Sekolah Provinsi	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Arliman, 2018). Kesejahteraan masyarakat tercermin dari distribusi pembangunan yang merata (Nurhuda, 2013). Dalam pembangunan tersebut terdapat berbagai macam dampak, baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan daerah adalah berkembangnya perekonomian di suatu daerah yang cepat, selain itu muncul juga dampak negatif yang timbul akibat dari adanya pembangunan tersebut salah satunya adalah terjadinya disparitas atau ketimpangan antar daerah.

Disparitas atau ketimpangan yang terjadi antar daerah merupakan sebuah konsekuensi yang dimiliki negara yang sedang berkembang. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam melakukan proses pembangunan. Kegiatan tersebut merupakan suatu tahapan perubahan yang dialami dalam pembangunan. Ketimpangan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kandungan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah serta alokasi dan pembangunan daerah (Sjafrizal, 2018). Jadi dalam sebagian besar suatu

daerah biasanya terdapat beberapa wilayah yang menjadi *underdeveloped region* dan beberapa wilayah menjadi *developed region* atau daerah maju (Dhyatmika & Atmanti, 2013).

Terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah ini selanjutnya membawa implikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Biasanya implikasi tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat seperti bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah sehingga dapat berlanjut dengan implikasi - implikasi politik dan ketentraman masyarakat yang akan menimbulkan konflik konflik di daerah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2018).

Faktor pertama yang membuat adanya ketimpangan adalah kondisi demografis. Demografis disini mencakup tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, tingkat pendidikan dan kesehatan (Sjafrizal, 2018). Indikator dari demografis yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *United Nation Development Programme* (UNDP) menjelaskan indeks ini memiliki 3 unsur kualitas sumber daya manusia diantaranya adalah daya beli, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan suatu wilayah dapat dikatakan sukses apabila suatu wilayah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan serta mendorong naiknya taraf hidup masyarakat secara merata. Rendah atau tingginya IPM akan berpengaruh pada tingkat produktivitas penduduk. Semakin tingginya IPM

maka berpengaruh terhadap tingkat produktivitas manusia. Semakin tinggi produktivitas manusia di wilayah tersebut maka akan berpengaruh juga terhadap pendapatan masyarakat. Apabila tingkat pendapatan di suatu daerah tinggi maka akan menambah kesejahteraan penduduk yang menyebabkan turunnya tingkat ketimpangan antar wilayah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Pamiati & Woyanti (2021) yang menyatakan bahwa kenaikan IPM akan berpengaruh kepada turunnya tingkat ketimpangan yang terjadi antar wilayah.

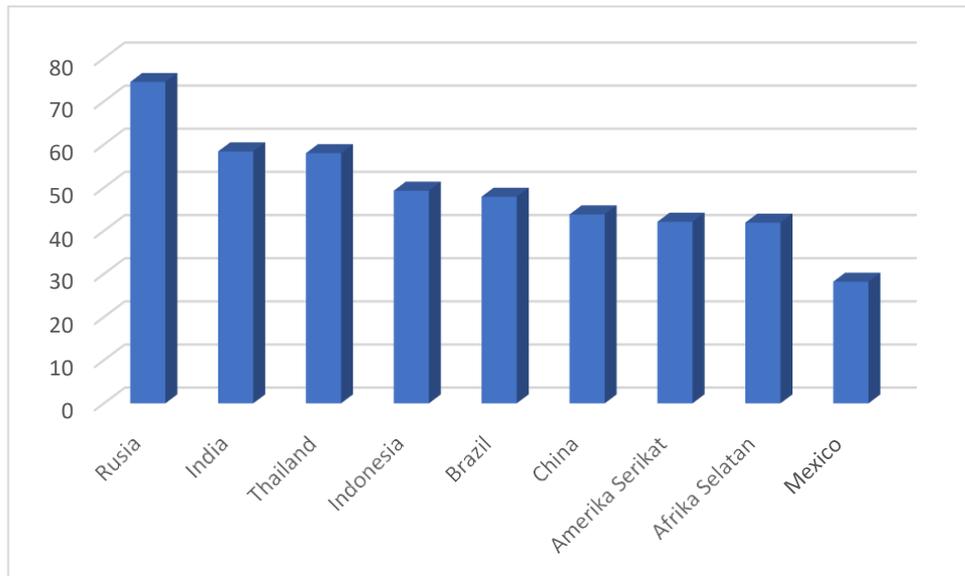
Selain faktor demografis suatu wilayah, terdapat juga faktor alokasi dan pembangunan daerah, salah satunya adalah belanja modal. Belanja modal merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila suatu daerah mempunyai alokasi belanja modal yang lebih besar, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga akan lebih cepat. Dana belanja modal yang dialokasikan diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pengurangan ketimpangan (Rosmeli, 2014). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfurqani et al (2021) bahwa belanja modal yang tidak merata antar daerah akan menyebabkan ketimpangan tinggi, karena pusat perekonomian hanya terpusat di daerah yang memiliki potensi tinggi. Sedangkan daerah yang tidak memiliki potensi akan cenderung mendapatkan belanja modal yang lebih rendah yang akan berujung kepada ketimpangan yang terjadi.

Faktor lain dari alokasi dan pembangunan selain belanja modal adalah investasi. Investasi yang dimaksud adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB merupakan salah satu komponen penyusun PDRB dimana PMTB ini mempresentasikan besarnya investasi pada suatu daerah. Penempatan investasi di suatu daerah tentu sangat terkait erat dengan tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana, serta jumlah tenaga kerja. Menurut Myrdal dalam Lestari et al (2021), kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar investasi akan berpengaruh terhadap ketimpangan antar wilayah. Hal ini dikarenakan tidak semua provinsi menjadi sasaran investasi. Salah satu faktor terpenting akan adanya pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dengan meningkatnya investasi maka diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi (Mansyur et al., 2021).

Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan. Karena dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi hal utama yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang tinggi (Andhiani et al., 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Kiton (2019) yang menyatakan bahwa Investasi mempengaruhi penurunan tingkat ketimpangan.

Ketimpangan yang ekstrim juga akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah angka kemiskinan di negara tersebut (Syamsir & Rahman, 2018). Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang berkembang, seperti negara berkembang

lainnya yaitu masalah ketimpangan antara *underdeveloped region* dan *developed region*.



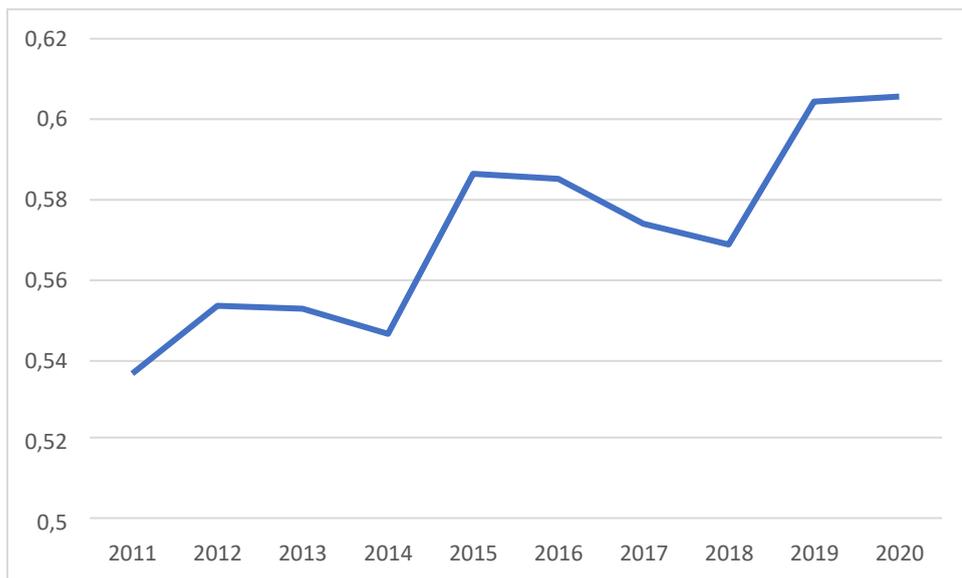
Sumber : Katadata, (2017)

Gambar 1. 1 Ketimpangan di Dunia Tahun 2017

Berdasarkan data yang dilansir oleh katadata pada tahun 2017 dapat diketahui bahwa Indonesia menjadi negara ke 4 dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Data tersebut didapatkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Lembaga Keuangan Swiss.

Menurut Perencanaan Pembangunan Nasional, Kawasan Timur Indonesia (KTI) senantiasa memperoleh atensi serta prioritas dari pemerintah. Apabila kita melihat kebelakang kesadaran pemerintah untuk membangun KTI sudah ada hal tersebut terbukti pada tahun 2002 pemerintah menerbitkan instruksi presiden nomor 7 tahun 2002 tentang kebijakan dan strategi nasional percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Komitmen serupa juga

terdapat pada RPJMN tahun 2010-2014 dimana dalam dokumen tersebut disebutkan 3 strategi pokok untuk mempercepat pembangunan di KTI, yaitu (1) pendekatan perwilayahan untuk percepatan pembangunan dengan menekankan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi antar provinsi di KTI. (2) peningkatan daya saing dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. (3) perubahan manajemen publik, yang juga memiliki korelasi yang sangat kuat untuk membangkitkan daya saing wilayah, dengan memperhatikan birokrasi. Tetapi setelah semua usaha yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan baru untuk mempercepat pembangunan di KTI, Kawasan Timur Indonesia masih mengalami tingkat ketimpangan yang tinggi.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Gambar 1. 2 Indeks williamson Wilayah Timur Indonesia 2011-2020

Dari Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa kondisi ketimpangan yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia masih berfluktuatif di setiap tahunnya. Tingkat ketimpangan yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia masih berada pada level tinggi, hal ini dikarenakan rata-rata nilai Indeks Williamson Kawasan Timur Indonesia masih di atas 0,5. Berdasarkan penjelasan yang menyatakan kenaikan IPM akan berpengaruh kepada turunnya tingkat ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah, maka disajikan data IPM Kawasan Timur Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020.

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia 2016-2020 Wilayah Timur Indonesia

Provinsi	IPM (Indeks)				
	2020	2019	2018	2017	2016
Nusa Tenggara Barat	68,25	68,14	67,30	66,58	65,81
Nusa Tenggara Timur	65,19	65,23	64,39	63,73	63,13
Sulawesi Utara	72,93	72,99	72,20	71,66	71,05
Sulawesi Tengah	69,55	69,50	68,88	68,11	67,47
Sulawesi Selatan	71,93	71,66	70,90	70,34	69,76
Sulawesi Tenggara	71,45	71,20	70,61	69,86	69,31
Gorontalo	68,68	68,49	67,71	67,01	66,29
Sulawesi Barat	66,11	65,73	65,10	64,30	63,60
Maluku	69,49	69,45	68,87	68,19	67,60
Maluku Utara	68,49	68,70	67,76	67,20	66,63
Papua Barat	65,09	64,70	63,74	62,99	62,21
Papua	60,44	60,84	60,06	59,09	58,05
Rata-Rata	68,13	68,05	67,29	66,59	65,91

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dari Tabel 1.1 nilai IPM di Kawasan Timur Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016-2020. KTI yang mendapatkan prioritas dan atensi lebih dari pemerintah ternyata memiliki nilai rata-rata IPM berada di kategori sedang (61 - 70) dengan nilai 65,91 – 68,13. Meskipun nilai IPM Kawasan Timur Indonesia berada pada level sedang tetapi di setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Karena mengalami kenaikan di setiap tahunnya, maka seharusnya ketimpangan yang ada di Kawasan Timur Indonesia mengalami penurunan.

Selain IPM, adapun faktor lainnya yang akan mempengaruhi ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia adalah belanja modal. Belanja Modal seharusnya dilakukan pemerintah untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana yang sudah ada seperti pada bidang Pendidikan, Kesehatan dan Transportasi. Tersedianya fasilitas publik akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Dari investasi tersebut akan mempercepat pembangunan dan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

Tabel 1. 2 Belanja Modal Tahun 2016-2020 Wilayah Timur Indonesia

Provinsi	Belanja Modal (Miliar)				
	2020	2019	2018	2017	2016
Nusa Tenggara Barat	513875.96	678168.063	891887.046	1153481.27 3	696681.64 6
Nusa Tenggara Timur	1574381.07 7	942500.079	529761.034	482924.905	602299.046
Sulawesi Utara	1013768.47 8	1202575.96	721402.643	757829.988	745899.590
Sulawesi Tengah	176050.145	304159.034	280499.514	254842.225	296922.958
Sulawesi Selatan	765940.347	836557.083	459780.934	465120.609	503973.010
Sulawesi Tenggara	1001199.03	1361188.08 9	1081805.77 5	1051187.33 1	856863.744
Gorontalo	267304.861	417433.064	321974.753	459836.46	498735.453
Sulawesi Barat	232031.478	1247603.44 1	795197.262	903121.912	751917.123
Maluku	680899.776	769852.571	601514.658	545780.528	832064.350
Maluku Utara	1197799.32 9	731285.767	513352.287	561613.74	592691.071
Papua Barat	1145341.02 1	2811607.95 3	1918505.42 8	2328012.67 4	2490333.44 2
Papua	2184125.50 5	1708112.80 5	1539271.67 2	770102.986	1446543.65 2

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 hingga 2020, pengalokasian belanja modal pada Kawasan Timur Indonesia mengalami kenaikan di tahun 2018 – 2019. Pada tahun 2015 – 2019, belanja modal nasional mengalami tren negatif sebesar 5.13persen. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia dari segi sarana dan prasarana. Berdasarkan upaya yang telah

dilakukan, seharusnya ketimpangan antar wilayah di KTI menurun. Namun hal ini justru terjadi sebaliknya, ketimpangan yang terjadi di KTI masih pada level tinggi. Melihat ketimpangan yang terjadi di suatu daerah dapat dilihat dari PDRB per-kapita yang ada di daerah tersebut. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu hal yang membentuk adanya PDRB. PMTB merupakan salah satu pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sarana dan prasarana di daerah tersebut .

Tabel 1. 3 PMTB Tahun 2018-2020 Di Kawasan Timur Indonesia

Provinsi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Miliar)				
	2020	2019	2018	2017	2016
Nusa Tenggara Barat	30386.4	32163.88	30007.15	28526.82	27709.65
Nusa Tenggara Timur	30989.78	33794.46	32035.76	30527.24	28741.68
Sulawesi Utara	30777.57	32653.62	30806.13	29718.18	27710.48
Sulawesi Tengah	46603.44	50649.31	42083.73	41366.81	39964.67
Sulawesi Selatan	127692.4	125557.7	118819.8	112387.3	103857.2
Sulawesi Tenggara	37940.57	38755.86	36804.9	34826.4	32248.52
Gorontalo	8474685	8559357	8285509	7956785	7721289
Sulawesi Barat	8810679	9630544	9082973	8617017	7984376
Maluku	9790421	9999058	9427749	8679359	8177012
Maluku Utara	16721.24	13156.47	7196599	7373487	6414637
Papua Barat	11302.85	11816.23	11133.96	10752.87	10472.31
Papua	43396.2	44058.8	42576.32	39870.1	37824.23

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dapat dilihat dari data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada rentang tahun 2016 – 2020. Pengeluaran pemerintah daerah melalui PMTB pada Kawasan Timur Indonesia mengalami kenaikan di tahun 2018 – 2019. Hal ini berbeda dengan PMTB nasional yang pada tahun 2018 – 2019 mengalami penurunan. Sama halnya dengan belanja modal, upaya yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Jumlah investasi yang terus meningkat pada tahun 2018 – 2019 seharusnya ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) semakin kecil dan membuat KTI menjadi kawasan yang maju dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Tetapi pada nyatanya, ketimpangan yang terjadi di KTI masih berada di level tinggi.

Ketimpangan antar wilayah merupakan permasalahan yang terjadi di setiap negara, salah satunya Negara Indonesia dan menjadi salah satu isu *urgent*. Berdasarkan penjabaran dari alasan-alasan yang melatarbelakangi ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia, dapat dikatakan bahwa IPM, Belanja Modal dan PMTB memiliki peran penting dalam mengurangi angka ketimpangan. Akan tetapi pada kenyataannya nilai IPM, pengeluaran pemerintah daerah, serta nilai investasi yang ada pada Kawasan Timur Indonesia masih belum mampu untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh IPM, Belanja Modal dan PMTB terhadap ketimpangan di Wilayah Timur Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh IPM, Belanja Modal dan PMTB terhadap ketimpangan di Wilayah Timur Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Sebagai referensi bagi pemerintah dan pejabat daerah dalam pembuatan kebijakan tentang ketimpangan yang terjadi khususnya di Kawasan Timur Indonesia
2. Sebagai sumber pengetahuan dalam menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah yang terjadi.

1.4.2. Manfaat Akademis

1. Sebagai rujukan para dosen maupun mahasiswa dalam mempelajari dan memahami mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
2. Menjadi referensi bagi para peneliti dengan konsep yang sama selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, H., & Budyanra. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 424–429. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.26>
- Alfurqani, Z. H., Widiarsih, D., & Aligusri, J. (2021). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten / Kota Di Provinsi Riau*. 1(1), 295–307.
- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 26–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4602>
- Angelia, Y. (2010). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008. *Skripsi*, 142.
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>
- Aprilianti, V. A., & Harken, A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(2), 1142–1160. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v5i2.111>
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328.
- Arliman, L. (2018). Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 273–294. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>
- Astria, S. A. (2014). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(Vol 12, No 1 (2014): June), 41–54. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/view/4867>
- Dhyatmika, K. W., & Atmanti, H. D. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. *Diponegoro Journal Of Economics*, 2, 2.
- Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economics Development Analysis Journal*, 5(1), 101–108.
- Dwiningsih, N. (2020). Analisa Penggunaan Metode Penelitian Regresi Data Panel Pada Studi Kasus Skripsi Mahasiswa Bimbingan Prodi Manajemen Universitas Trilogi. *Laporan Penelitian*.

- Endarwati, U., Saenong, Z., & Rahim, M. (2017). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Pulau Jawa. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 2(1), 72–85. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP/article/view/8105/5909>
- Fan, S., Kanbur, R., & Zhang, X. (2011). China's regional disparities: Experience and policy. *Review of Development Finance*, 1(1), 47–56. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2010.10.001>
- Gabriel, C. T., Walewangko, E. N., & Mandej, D. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Industri Pengolahan Sektor Perikanan terhadap Ketimpangan Pembangunan Kota Bitung Tahun 2002 – 2020. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7), 127–137.
- Halim, A., Supomo, B., & Kusufi, M. S. (2006). *Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungan dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan* (pp. 60–61).
- Hendarmin, H. (2019). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 245. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.11186>
- Hidayat, M., & Rahayu, S. (2018). Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau: Pendekatan Regresi Kuadratik. *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)*, 7(1), 13–21. <http://jes.stiesak.ac.id/index.php/103044/article/view/156>
- Imam, G. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel " Tahap Analisis ". *Blog Dosen Perbanas*, 2, 1–7.
- Juliana, R., & Soelistyo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, PAD, IPM, dan UMK terhadap Ketimpangan di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(2), 293–300. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/8232>
- Kiton, M. A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*, 3(2), 68–80. <http://stmb-multismart.ac.id/ejournal>
- Kusumaningrum, S., & Yuhan, R. J. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pertumbuhan Inklusif dan Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1150>
- Lestari, D. N., Indrawati, L. R., & Jalunggono, G. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Directory Journal of Economic*, 3(1).

- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 95–112. <https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071>
- Mangkoesebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Mansyur, K., Nurisni, & Hamrullah, H. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. *Development Policy and Management Reveiw*, 1(2), 79–107.
- Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jesp*, 7(2), 9–26.
- Niswah, F. (2017). Analisis Pengaruh Variabel Struktur Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Kredit Investasi, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 2(4), 44–52.
- Nurhuda, R. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(4), 110–119.
- Pamiati, B., & Woyanti, N. (2021). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, Tpk Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Barlingmascakeb 2013-2019. *Business Economic Entrepreneurship*, 4(1), 17–28.
- Pinandito, T. S., Asfiani, N., Mardziyah, A., & Pawestri, N. (2020). Pengembangan Potensi Ekonomi Pesisir Kabupaten Gunungkidul Berbasis Interconnected Governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 177. <https://doi.org/10.20961/sp.v14i2.39294>
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. (2017). Pengaruh Ipm, Biaya Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2), 255–285.
- Putri, N. putu V. S., & Natha, I. K. S. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), 41–49.
- Putri, P. I. (2014). PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, BELANJA MODAL, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PULAU JAWA. *Journal of Economics and Policy*, 7(708). <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Rifqah, N. (2017). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecosain*, 6(2), 91–102.

- Rosmeli. (2014). Dampak belanja daerah terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(4), 88–90.
- Sapaat, T. M., Lopian, A. L. C. P., & Tumangkeng, S. Y. L. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun (2005-2019). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 45–56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30641/29475>
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 553–562.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional Dan Penerapannya di Indonesia*. PT.Rajagrafindo.
- Syamsir, A., & Rahman, A. (2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.24252/ecc.v5i1.5235>
- Syaripuddin, Semmaila, B., & Aminuddin. (2021). Pengaruh Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sulawesi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 39–55.
- Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 4(1), 39–63.